ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA SISKEUDES SEBAGAI *BUDGETING CONTROL* DI DESA MARGOMULYO

JURNAL

SUPARDI H. ALI

NIM. D03417102

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2021



JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index

ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA SISKEUDES SEBAGAI *BUDGETING CONTROL* DI DESA MARGOMULYO

Supardi H. Ali[1]. Yuwin Ali[2].
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email;

Abstract:

SUPARDI H. ALI. An analysis of Margomulyo Village's use of the SISKEUDES Village Financial System as a budgeting control system. Under the direction of Yuwin Ali, S.E. M. Ak
Understanding how the SISKEUDES application is managed as a budgeting control in Margomulyo Village, Tolangohula District, is the goal of this essay. This essay takes a descriptive approach while utilizing a qualitative writing style. As a result of this article, the Margomulyo Village administration has implemented SISKEUDES as a budgeting control. However, because it is based on the theory proposed by Sasongko and Parulian, it has not been optimized. Planning, monitoring, adjusting, and evaluating are all part of budget control. Margomulyo Village will undoubtedly conduct RKPDes, or planning, before using the budget. After that, HR from Margomulyo Village still had trouble using SISKEUDES for supervision because it was still new and unfamiliar. They also had trouble creating receipt and expenditure journals, including complete financial reports, because they lacked basic accounting knowledge. Finally, it was discovered that the village government was still spending money from a budget that had not been discussed during planning. Additionally, the Village Government agrees to organize an evaluation meeting in order to assess and rectify any disparities in budget utilization.

Keywords: Village, Budgeting Control, and SISKEUDES

ABSTRAK

SUPARDI H. ALI Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES Sebagai Budgeting Control Di Desa Margomulyo. Dibimbing oleh YUWIN ALI. SE. M.Ak
Penulisan ini bertujuan untuk adalah dapat mengetahui pengelolaan aplikasi SISKEUDES sebagai budgeting control di Desa Margomulyo Kecamatan Tolangohula. Penulisan ini menggunakan jenis penulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Hasil penulisan ini adalah pemerintah Desa Margomulyo sendiri sudah menggunakan SISKEUDES sebagai budgeting control, namun belum dimaksimalkan karena berdasarkan teori yang dikemukakan Sasongko dan Parulian budgeting control meliputi perencanaan, pengawasan, koreksi dan evaluasi. Desa Margomulyo sebelum menggunakan anggaran pasti akan melakukan perencanaan terlebih dahulu yang disebut RKPDes. Kemudian untuk pengawasan dalam hal penggunaan SISKEUDES SDM dari Desa Margomulyo masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut karna masih baru dan belum familiar dan juga dalam membuat jurnal penerimaan dan pengeluaran termasuk keseluruhan laporan keuangan masih sulit karena tidak memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi, kemudian pemerintah Desa didapati masih mengeluarkan anggaran yang tidak dibahas dalam perencanaan. Selanjutnya untuk evaluasi dan koreksi pemerintah Desa mengakui bahwa jika terdapat ketidaksamaan dalam penggunaan anggaran maka akan mengadakan rapat evaluasi.

Kata Kunci: SISKEUDES, Budgeting Control, Desa

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem penerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman yang biasanya memiliki sebuah nama, letak dan batas-batas wilayah tertentu dengan tujuan membatasi dan membedakan antar satu Desa dengan Desa lainnya (Indra Bastian, 2015). Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk menentukan dan mengeurus tata kelola pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup untuk masyarakat Desa, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1B yang menyatakan bahwa salah satu pendapatan desa bersumber dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh setiap Desa dalam jumlah yang begitu besar untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu Pemerintah Pusat mengharapkan dengan adanya bantuan dana ini Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dengan baik dan tepat sasaran untuk menjalakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya alokasi Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada tiap Desa, hal ini akan mengalami potensi tindak penyelewengan Dana Desa atau korupsi sehingga rentan adanya aparatur Desa yang menyalahgunakan Dana Desa yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Desa diperlukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2015 pemerintah telah menciptakan suatu sistem aplikasi yang dapat membantu pemerintah Desa dalam membuat pelaporan keuangan Desanya secara sistematis, yaitu Sistem Keuangan Desa atau “SISKEUDES”, dimana sistem ini telah diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2015 yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga memiliki peran penting dalam membantu berjalannya aplikasi yang diterapkan di pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa dengan fitur pendukung yang dapat memudahkan pemerintahan Desa dalam membut dan melaporkan laporan keuangan Desanya sehingga laporan yang dihasilkan lebih berkualitas (BPKP, 2021). penyelewengan dana

desa dari tahun 2015-2020 dimana kasus tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu penyelewengan dana desa mencapai 98 kasus dan sampai dengan pada 2020 kasus penyelewangan dana desa masih mencapai 42 kasus sehigga pengawasan ini dirasa penting untuk dilakukan karena dana yang bersumber dari negara memiliki jumlah yang besar, maka diperlukan mekanisme pengendalian dari lembaga-lembaga Desa serta dari pemerintah Desa untuk mengawasi penggunaan dana Desa tersebut, agar dana Desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini memunculkan Pemerintah dalam membuat Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai teknologi yang berkembang pesat dijaman sekarang ini berupa aplikasi yang membantu penginputan pelaporan keuangan yang baik. Menurut (Marshall dan Paul, 2014) . Siskeudes merupakan aplikasi yang bertujuan memudahkan Desa dalam mengelola keuangan Desanya, selain itu untuk menata kelola keuangan Desa secara optimal, Siskeudes juga sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan Desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang, adanya Siskeudes ini merupakan usaha dan komitmen besar untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa, dengan disediakannya fitur-fitur yang dibuat sederhana dan memudahkan penggunanya dalam mengoperasikan Siskeudes, dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPKP yang telah mengembangkan aplikasi Siskeudes ini yang didesain untuk mempertimbangkan keterbatasan kapasitas SDM aparatur Desa baik dari segi pemahaman maupun pengalaman dalam mengelola keuangan Desa dan dapat mengakomodir pengelolaan keuangan Desa sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa dengan penyusunan laporan yang praktis dan terotomatisasi, laporan keuangan Desa yang dihasilkan akan lebih transparan dan akuntabel demi terciptanya tata kelola pemerintah Desa yang baik (BPKP, 2021). Tetapi setelah adanya implementasi penerapan aplikasi Siskeudes ini, sebagian perangkat Desa mengalami beberapa kendala dalam pengoperasiannya sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan.

Desa Margomulyo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Desa yang sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa Siskeudes, meskipun sudah menggunakan Sisikeudes peneliti masih mendapati beberapa masalah yang terjadi di Desa Margomulyo. Masalah yang terjadi antara lain yakni Desa tidak membuat laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan, akibatnya akan sulit untuk mengetahui informasi tentang kas, oleh karena itu peneliti mengidentifikasi ini sebagai keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang belum menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban laporan. Selanjutnya ketika pemerintah ditingkat kecamatan mengadakan kegiatan dan memerlukan dana, maka dananya di minta dari pemerintah Desa. Pemerintah desa pun mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut padahal dana untuk kegiatan kecamatan ini tidak pernah dianggarkan sebelumnya, berikutnya masalah yang juga ditemukan oleh peneliti adalah Desa Margomulyo juga tidak melakukan pemisahan antara jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas ini mengakibatkan sulitnya untuk menidentifikasi mana transaski dari penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Tentunya jika pemerintah Desa Margomulyo masih mengalami kesulitan dalam proses diatas maka ini akan berpengaruh terhadap pelaporan pengelolaan keuangan Dana Desa. Selain itu Desa Margomulyo sendiri masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan Siskeudes karena terus mengalami perubahan ini tentunya dapat menjadi kendala dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Margomulyo dan justru bertolak belakang dengan Tujuan dikembangkannya Siskeudes yaitu membantu pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa secara efektif, efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasrkan filsafat (*postpositivisme*), digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainya (Sugiyono, 2016).

Data primer menurut Sugiyono (2016), adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah Desa tentang transparansi dan akuntabilitas. Prosedur

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 proses pengumpulan data, sebagai berikut Sugiyono (2016) :

1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai penerapan Siskeudes Desa Margomulyo, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa melalui Siskeudes.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak diperoleh melalui observasi, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan oleh peneliti kepada seseorang (sampel) mengenai topic penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawaban sendiri.

3. Dokumentasi

Disamping observasi dan wawancara penelitian kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup badget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, korespondensi, brosur, informasi, materi pengajaran, laporan berkala, websites, paket orientasi, atau rekruitmen, kontrak, catatan proses pengadilan, poster, dan jenis item tertulis lainnya.

Analisis data penelitian kualitatif menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif, dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan memperhatikan antara hasil temuan di lapangan dengan teori yang berhubungan dengan fokus penelitian menjelaskan realita dengan teori yang ada sehingga dapat diketahui apakah sesui dengan teori. Menurut Sugiyono, (2016) trigulasi sebagai pengecekan data dari sebagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan waktu

PEMBAHASAN

Penerapan Sistem keuangan Desa Siskeudes merupakan aplikasi berbasis online, menggunakan *user id* dan *password* Desa untuk bisa menggunakannya, penerapannya menggunakan database *Microsoft access* sehingga lebih mudah diterapkan. Aplikasi Siskeudes merupakan alat untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif sehingga penggunaannya bersifat online. Siskeudes merupakan kebijakan yang dibuat sesuai dengan Permendegri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana kebijakan tersebut harus dijalankan agar tercapai

tujuan dari aplikasi Siskeudes, yaitu agar pengelolaan keuangan Desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif. Siskeudes merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa secara komputerisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya Siskeudes ini dapat mempermudah dalam menyajikan laporan Anggaran Dana Desa kedepannya, serta dapat menjadi sebuah solusi bagi pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuan dari penerapan aplikasi tersebut. Siskeudes dijadikan sebagai alat kontrol penggunaan anggaran karena dalam proses pelaksanaan dari Siskeudes ini harus disesuaikan dulu dengan apa yang ada pada sistem. Jadi sebelum memasukan anggaran perencanaan pada Siskeudes pemerintah desa terlebih dahulu membuat anggaran perencanaan seperti RAB atau RKPDes yang telah disesuaikan dengan sistem, Jika RAB atau RKPDes tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam sistem, maka sistem tidak dapat menginput data (Ayu Gusti, 2017)

Pengendalian Anggaran (*Budgeting Control*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Pengendalian Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang dibuat secara tepat dan cermat berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu satu periode (Wijaya, 2015). Pengendalian anggaran adalah proses atau usaha yang sistimatis dalam penetapan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan kegiatan, sistem informasi penggunaan keuangan, membandingkan pelaksana an nyata dengan perencanaan menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Pengendalian yang merupakan bagian terbesar dalam suatu organisasi pemerintahan. Pengendalian anggaran adalah proses untuk memberikan kembali menilai dan selalu memonitor laporan-laporan apakah pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan yang sudah yang sudah ditentukan.

Perencanaan Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan untuk membuat manajemen dapat menetapkan

target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan untuk dapat menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Dalam penelitian ini yang berdasarkan pada keseluruhan hasil wawancara peneliti mendapati bahwa pemerintah Desa dalam penggunaan anggaran desa mereka selalu membuat RKPDes sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dengan melalui tahapan musyawarah atau musrembang dulu untuk membuat rencana pembangunan tahunan desa dengan membentuk tim penyusun RKPDes, setelah RKPDes tebentuk maka akan diinput pada aplikasi Siskeudes, dan dalam penggunaan anggaran pemerintah desa memprioritaskan penggunaan anggaran untuk pembangunan jalan, pembuatan saluran air, rainase, gorong-gorong serta untuk bantuan usaha kecil kepada masyarakat. Dari hasil keseluruhan wawancara itu peneliti menilai pemerintah Desa Margomulyo dalam tahap perencanaan sudah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sasongko dan Parulian (2015) bahwa dalam pengendalian anggaran tahapan perencanaan dibutuhkan dalam organisasi untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran selain itu juga dapat membantu organisasi dalam menentukan target-target yang akan dicapai.

Pengawasan anggaran untuk melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan dari rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Keberadaan pengawasan anggaran pada perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Dalam penelitian ini berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara peneliti mendapati bahwa anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Margomulyo itu belum sesuai dengan RKPDes, karena ada anggaran yang tidak dibahas dalam RKPDes tahun berjalan seperti pembuatan kamar mandi umum bagi masyarakat dan pengeluaran dana kecil tak terduga itu pembiayaan atau anggaranya tetap dikeluarkan, tentunya untuk pengeluaran yang dikeluarkan namun tidak dianggarkan sebelumnya ini bertolak belakang dengan prinsip perencanaan yang telah dikemukan oleh Sasongko dan Parulian (2015) karena teryata pemerintah Desa Margomulyo masih mengeluarkan anggaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya. Padahal dalam penggunaan anggaran ada BPD yang berfungsi melakukan pengawasan apakah pelaksanaan telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian Desa

Margomulyo mengontrol setiap anggaran melalui aplikasi sistem keuangan desa atau Siskeudes namun dalam mengoperasikannya pemerintah desa masih mengalami kesulitan karena belum familiar menggunakan aplikasi Siskeudes, selain itu kaur keuangan dalam membuat jurnal penerimaan dan pengeluaran termasuk keseluruhan laporan keuangan masih mengalami kesulitan karena tidak memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi

Evaluasi dan Koreksi sebagai alat tolak ukur yang dipakai untuk membandingkan hasil perencanaan dan realisasi serta melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (bila terdapat penyimpangan yang merugikan). Dalam penelitian ini berdasarkan hasil keseluruhan wawancara peneliti mendapati bahwa Desa Margomulyo Kabupaten Gorontalo sendiri untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pemerintah desa ataupun BPD membandingkan antara perencanaan yang ada di RKPDes dengan hasil dari perencanaan, dengan melihat antara laporan pertanggungjawaban yang disajikan sudah sesuai dengan bukti transaksi yang ada, serta melihat secara langsung bentuk fisik dari penggunaan anggaran tersebut. Dalam menggunakan anggaran pemerintah desa selalu menyesuaikan dengan perencanaan yang ada dalam RKPDes walaupun ada juga anggaran yang tidak direncanakan sebelumnya namun tetap dikeluarkan, jika terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran pemerintah akan mengadakan rapat triwulan untuk evaluasi dan membuat koreksi terhadap ketidaksesuaian tersebut oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa untuk menghindari terjadinya kesalahan pemerintah Desa Margomulyo akan mengadakan evaluasi perbaikan untuk mengatasi ketidaksesuaain tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Sebagai *Budgeting Control* Di Desa Margomulyo, peneliti menyimpulkan bahwa Desa Margomulyo sendiri sudah menggunakan Siskeudes sebagai *budgeting control*, namun belum dimaksimalkan karena berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sasongko dan Parulian *budgeting control* meliputi perencanaan, pengawasan, koreksi dan evaluasi. Desa Margomulyo sebelum menggunakan anggaran pasti akan melakukan perencanaan terlebih dahulu yang disebut RKPDes. Kemudian untuk pengawasan dalam hal penggunaan Siskeudes SDM dari desa Margomulyo masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut karna masih baru dan belum familiar selain itu kaur keuangan dalam membuat jurnal

penerimaan dan pengeluaran termasuk keseluruhan laporan keuangan masih mengalami kesulitan karena tidak memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi, kemudian pemerintah desa didapati masih mengeluarkan anggaran yang tidak dibahas dalam perencanaan. Selanjutnya untuk evaluasi dan koreksi pemerintah desa mengakui bahwa jika terdapat ketidaksamaan dalam penggunaan anggaran maka akan mengadakan rapat evaluasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Margomulyo tidak menggunakan anggaran desa untuk keperluan yang tidak dianggarkan sebelumnya agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang kurang perlu.
2. Pemenrintah desa dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam membuat pelatihan tentang Siskeudes bagi aparat desa yang bertugas menjalankan aplikasi Siskeudes, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang Siskeudes sebagai *Budgeting control* agar lebih mendalami kajian penelitian ini sebagai bahan rujukan tanpa melupakan nilai keaslian dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495

Bastian I. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2021 Sistem Keuangan Desa

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D., Bandung: Afabeta.

Saryono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Alfabeta.

Wijaja 2016. *Metode* Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sasongko, Parulian. 2015., Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.